

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan menjadi bagian yang tidak terlepaskan bagi upaya sadar pencapaian manusia terhadap kesejahteraan dan kemakmuran. Pendidikan menjadi persyaratan yang mutlak mesti ada apabila sebuah bangsa, masyarakat, komunitas atau keluarga ingin mencapai taraf hidup yang lebih baik, sejahtera dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, mengembangkan perkenomian serta meningkatkan kesejahteraan sosial (Saharudin dan Hakim, 2011).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dalam mencapai tujuan tersebut, terkait dana pendidikan telah ditetapkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah membuat kebijakan dalam mempercepat pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat yakni dengan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 sTahun 2018 tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Peraturan Mendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan

dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang putus sekolah untuk jenjang SD sebanyak 39.213 siswa (0,15%), putus sekolah untuk jenjang SMP sebanyak 38.402 siswa (0,39%), putus sekolah untuk jenjang SMA sebanyak 36.419 siswa (0,84%) dan putus sekolah untuk jenjang SMK sebanyak 72.744 siswa (1,68%). Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat mencapai 101,05% sedangkan untuk APK SM sederajat mencapai 81,95% (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai per 1 Januari 2017, maka pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA/SMK Negeri di Pemerintah Kabupaten dan Kota, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Terdapat tiga hal yang diserahkan Kabupaten/Kota kepada Provinsi terkait dengan pendidikan, yakni masalah aset sekolah, tenaga kependidikan, serta keuangan. Alih kelola SMA/SMK ke pemerintah daerah Provinsi diharapkan dapat memberikan dampak yang efektif dalam mewujudkan WAJAR 12 tahun.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengakui proses alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi menimbulkan banyak masalah diantaranya terkait kesejahteraan guru honorer dan distribusi guru pegawai negeri sipil. Pemerintah belum berencana untuk menambah persentase peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kini ditetapkan sebesar 15 persen untuk membayar gaji guru honorer. Peralnya, dana BOS lebih diutamakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah (www.pikiranrakyat.com, dikutip 15 Maret 2019).

Pada pelaksanaanya pengelolaan program dana BOS masih belum berjalan efektif. Hal ini didukung informasi yang menyebutkan bahwa Kepala Pusat

Putri Humaira, 2021

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian (BK) DPR RI yaitu Helmizar menilai, pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 2015-2018 dianggap masih kurang efektif. Helmi mengatakan, diskusi yang digelar dengan Pejabat Kemendikbud menjadi momentum konfirmasi terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dana BOS di Kemendikbud RI. Helmi juga menjelaskan bahwa BPK telah mengaudit pengelolaan BOS oleh Kemendikbud dari 2015 sampai dengan semester I 2018, sehingga pada 2019 perlu dilakukan perbaikan dalam hal pengelolaan dana BOS. (www.dpr.go.id, dikutip 1 Juli 2019)

Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak terlepas dari masalah penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS. Berdasarkan hasil kajian PATTIRO bahwa terdapat beberapa temuan terkait dana BOS, PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang mendedikasikan aktivitasnya pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Temuan tersebut diantaranya adalah (1) Satuan biaya operasional non personal yang ditanggung oleh program BOS tidak mencukupi kebutuhan biaya pendidikan yang mesti ditanggung oleh sekolah atau siswa. Ada selisih yang signifikan antara satuan biaya BOS dan satuan biaya yang dibutuhkan; (2) Sumber pendanaan program BOS sebagian berasal dari utang luar negeri, atau melalui mekanisme PHLN. Kebijakan ini menyebabkan kerentanan program BOS dari aspek keberlanjutan dan akuntabilitas publik; (3) Transfer dana dari pemerintah ke pemerintahan daerah, dan dari pemerintahan daerah ke sekolah telah terjadi keterlambatan, dimana keterlambatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kelambanan pihak Pemda dalam mencairkan dana ke sekolah. Namun juga disebabkan hal lain, seperti kelambanan transfer dana dari pemerintah ke Pemda, beban kerja berlebih dari BUD, sosialisasi yang lambat dan kapasitas Pemda, persyaratan tambahan Pemda, dan kepatuhan sekolah yang rendah; dan (4) Kepatuhan sekolah dalam penyelenggaraan program BOS yang akuntabel, partisipatif, dan transparan masih rendah (Saharudin dan Hakim, 2011).

Putri Humaira, 2021

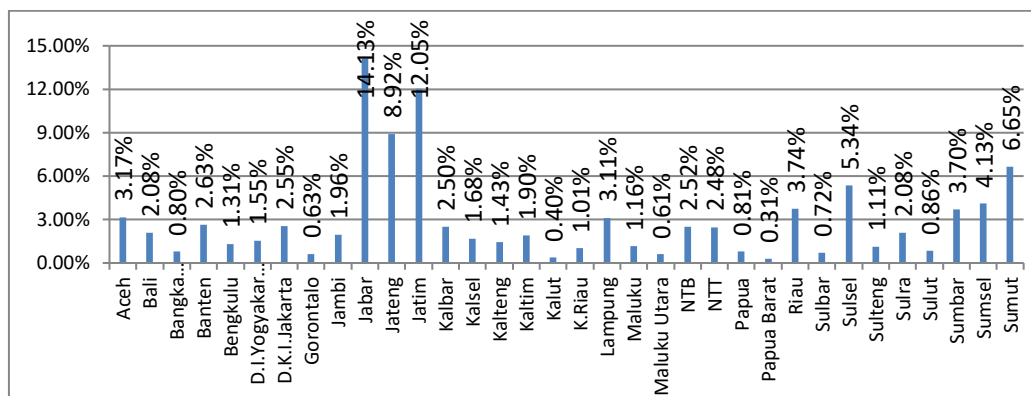
PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dana BOS yang dikucurkan merupakan jumlah yang besar dan akan bertambah setiap tahunnya. Dengan pengelolaan dana BOS yang baik maka seharusnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pun akan tercapai. Namun Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menyatakan penyimpangan anggaran BOS disebabkan oleh adanya pelanggaran regulasi oleh beberapa Pemerintah Daerah dan sekolah penerima dana (cnnindonesia.com, dikutip 1 Maret 2019). Siti Juliantri peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyampaikan bahwa dari data yang dihimpun 2018 pendidikan masih jadi sektor yang paling banyak dikorupsi. Modus yang kerap terjadi dalam korupsi bidang pendidikan ini berupa laporan kegiatan/proyek fiktif, mark up anggaran, pungutan liar, penggelapan dana dan penyelewengan anggaran. Namun total kerugian terbesar disebabkan oleh modus mark up anggaran. (Timesindonesia.co.id, dikutip 2 Maret 2019).

Di bawah ini akan disajikan perbandingan persentase realisasi penyaluran dana BOS pada setiap provinsi di Indonesia yaitu sebagai berikut :

Grafik 1. 1
Data Persentase Realisasi Penyaluran Dana BOS Pada Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2018



Sumber : Data diolah dari Kemendikbud (www.bos.kemdikbud.go.id) tahun 2019

Dari grafik 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa provinsi di Indonesia yang mendapatkan nilai persentase realisasi dana BOS tertinggi pada tahun 2018 yaitu Jawa Barat sebesar 14,13% atau 1.045.963.240.000,00. Sementara provinsi di Indonesia yang mendapatkan nilai persentase realisasi dana BOS tertinggi pada

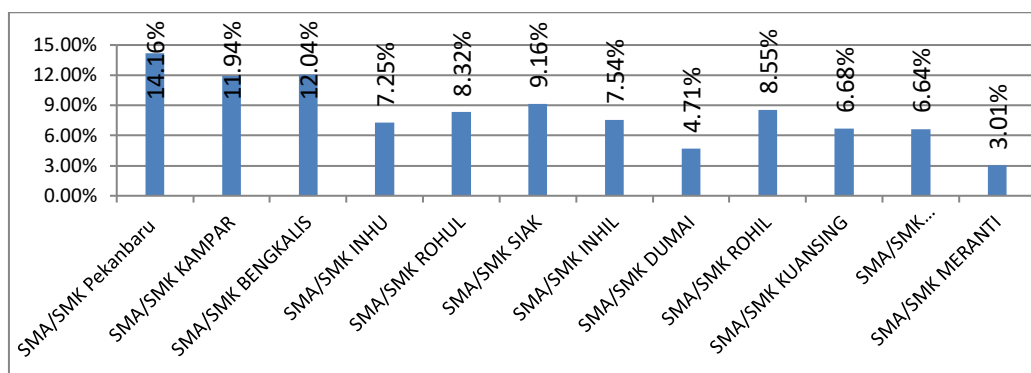
Putri Humaira, 2021

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tahun 2018 yaitu Papua Barat sebesar 0,31% atau 22.639.680.000,00. Provinsi Riau mendapatkan nilai persentase realisasi dana BOS yang cukup besar masuk kedalam sepuluh besar di atas rata-rata nilai realisasi dana BOS dari keseluruhan provinsi di Indonesia yaitu sebesar 3,74% atau 276.964.800.000,00. Di bawah ini akan disajikan nilai persentase reasilisasi dana BOS SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

Grafik 1. 2
Data Realisasi Penyaluran Dana BOS Pada Provinsi Riau Tahun 2018



Sumber : Data diolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019

Dari grafik 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru merupakan salah satu penerima dana BOS terbesar untuk SMA dan SMK sebesar 14,16% atau 73.464.420.238. Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS di Kota Pekanbaru masih ada penyelewengan atas dana BOS yang terjadi. Salah satu Ormas Nasional perwakilan Kota Pekanbaru melaporkan salah satu sekolah menengah negeri terkait dugaan korupsi dana BOS pengadaan komputer tahun ajaran 2015-2017 yang berpotensi Rp. 1,5miliar (pewartaindonesia, dikutip 15 Maret 2019).

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu Ahyu Suhendra mengakui angka dana BOS disalurkan ke sekolah-sekolah masih dianggap kurang. Sehingga sekolah harus utamakan hal prioritas. Kurangnya dana BOS juga dibarengi dengan belum efektifnya pengelolaan dana BOS. Pada pelaksanaannya, masih terdapat sekolah yang meminta pungutan yang bersifat mengikat kepada masyarakat

Putri Humaira, 2021

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(orang tua siswa), hal tersebut menurut Ahyu tidak dibenarkan. Agar pengelolaan dana BOS berjalan efektif, Ahyu menyampaikan solusinya sekolah harus benar-benar dapat menyusun dana Bos dan bosda dalam bentuk RKAS yang lebih tepat dan efektif penggunaan dari dana tersebut (www.pekanbaru.tribunnews.com, dikutip 1 Juli 2019).

Informasi tersebut didukung oleh pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Riau yaitu Kamsol yang mengakui masih banyak anak-anak di Provinsi Riau seperti di Kota Pekanbaru yang putus sekolah terkendala biaya. Selain masalah pengelolaan dana BOS yang dianggap masih kurang efektif, penyebab banyak anak putus sekolah di Riau adalah letak pemukiman penduduk yang tidak strategis dengan lokasi sekolah. Selain itu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah pusat, tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan para siswa yang terkendala masalah ekonomi. (<http://www.riauonline.co.id>, dikutip, 1 Juli 2019).

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa masih kurang efektifnya pengelolaan dana BOS di Kota Pekanbaru Riau ditunjukkan dengan masih banyaknya anak yang putus sekolah karena terkendala biaya. Selain itu dana BOS yang diperoleh untuk SMA dan SMK dianggap masih kurang, padahal jika dilihat dari data yang diperoleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau bahwa Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang mendapatkan dana BOS untuk SMA dan SMK terbesar di Provinsi Riau.

Salah satu cara untuk meingkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat

Putri Humaira, 2021

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Mahmudi, 2013:19). Salah satu prinsip pelaksanaan kegiatan yang efektivitas adalah pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), yaitu untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan, maka kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan membuat laporan yang tepat, obyektif menurut data dan fakta yang dapat dipercaya (Dinar, 2016).

Akuntabilitas penting dilakukan dalam pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah sebagai instansi pendidikan wajib memberikan pertanggung jawaban kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Anggraini, 2013). Akuntabilitas menjadi suatu keharusan bagi setiap penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam hal ini pihak sekolah untuk memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan program dana BOS secara akuntabel. Adanya pelaksanaan prinsip akuntabilitas akan berdampak terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Apriliani, 2018).

Namun pada kenyataannya, akuntabilitas pengelolaan dana BOS masih belum optimal. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahyu Suhendra selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan bahwa permasalahan pengelolaan yang berkaitan dengan dana BOS selama ini adalah penyampaian RKA dana BOS selalu tidak tepat waktu, tidak akuntabel dan tidak tepat sasaran sehingga penyaluran sering tertunda. Serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program BOS (disdik.riau.go.id, dikutip 1 Maret 2019).

Informasi lainnya menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengingatkan seluruh sekolah yang telah menerima dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahun 2018, sekaligus mengajukan dana BOS untuk tahun 2019. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Rudiyanto, menjelaskan untuk dana BOS SMA/SMK

sederajat di Riau, masih banyak yang belum menyerahkan laporan. (www.riaulink.com, dikutip 1 Juli 2019).

Selain akuntabilitas, transparansi juga penting dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan dana BOS. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Tanjung, 2014:11). Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo 2009:18).

Transparansi menjadi salah faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Transparansi bertujuan dalam menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Hamid, 2007).

Semakin tinggi transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan semakin efektif. Adanya penerapan transparansi yang dilakukan oleh penerima program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam hal ini sekolah terhadap pihak-pihak berkepentingan, maka akan berdampak terhadap efektivitas dana BOS (Apriliani, 2018). (Apriliani, 2018).

Pada kenyataannya, Ketua Komisi V DPRD Riau yaitu Aherson menyebutkan bahwa pendidikan bukan hanya tanggungjawab negara saja melainkan swasta dan masyarakat. Aherson menanggapi laporan masyarakat terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Aherson menyoroti penggunaan dana BOS selama ini kurang transparan (www.kabarmelayu.com, dikutip 5 Juli 2019). Akibat kurangnya transparansi dalam penggunaan dana BOS, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru telah bekerjasama dengan Badan

Putri Humaira, 2021

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kepala Disdik Kota Pekanbaru yaitu Abdul Jamal menyebutkan pihaknya juga telah membuat sistem online terkait berbagai pelaporan yang menyangkut penggunaan dana BOS. (www.cakaplah.com, dikutip 5 Juli 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Ita Rakhmawati (2018) tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dengan Partisipasi *Stakeholder* Sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS dan partisipasi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Penelitian Fauzan (2013) tentang Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana BOS, dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana BOS.

Penelitian Kadek Sutrisna dan Putu Sukma Kurniawan (2017) tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan, Pengendalian Internal Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah menunjukkan bahwa prinsip transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah, prinsip akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah. Penelitian Ahmad dan Lokman (2014) menyatakan pada perencanaan penggunaan dana operasional sekolah di RKAS dan Manajemen BOS menunjukkan bahwa guru dan komite sekolah jarang terlibat dan berimplikasi pada RKAS terlambat dan penggunaan dana operasional tidak efektif.

Penelitian Henny Hendratni, JMV Mulyadi, dan Tri Widiastuti (2017) tentang Pengaruh Transparansi dan Komitmen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Putri Humaira, 2021

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Anggaran Sekolah menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menganggap penelitian ini perlu dilakukan kembali melihat hasil penelitian sebelumnya yang bervariasi dengan pengambilan sampel yang berbeda, maka peneliti mengangkat judul

:“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada SMA dan SMK Negeri di Kota Pekanbaru) “

1.2 Rumusan Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa, karena pendidikan sebagai pencipta sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kontribusi sangat besar terhadap suatu kemajuan. Namun kurangnya transparansi dan akuntabilitas dana BOS mengakibatkan permasalahan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS yang merugikan masyarakat dan indikator capaian pemerintah menjadi kurang optimal. Berdasarkan uraian tersebut maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dan BOS?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS?

Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA dan SMK Negeri Kota Pekanbaru.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS
2. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS
3. Mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Akademis

Penelitian Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa pemikiran dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai efektivitas pengelolaan dana BOS.

1.4.2 Praktis

Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi sekolah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas pengelolaan dana BOS dan implementasinya.